

Integrasi Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peran Lembaga Adat Dalam Pengambilan Keputusan

Environmental Ethics, Local Wisdom, And The Role Of Customary Institutions In Sustainable Development Decision-Making

Rafiqah Nabilah¹, Mulawarman², Nurul Sholeha³, Andries Riesfandhy⁴, Afni⁵

¹ Program Studi Teknologi Metalurgi Ekstraksi, Fakultas Vokasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

^{2,3,4,5} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi Sudirman, Bone, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 03

Page : 330-338

Published : 2026

KEYWORDS ENVIRONMENTAL ETHICS; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; CUSTOMARY INSTITUTIONS; AMMATOA KAJANG; TOWANI TOLOTANG

Five words maximum, comma separated

CORRESPONDENCE

Phone: +628

E-mail: rafiqahnabilah19@gmail.com

A B S T R A C T

Purpose: Sustainable development aims to meet present needs while preserving environmental capacity and resources for future generations. However, development activities that neglect environmental aspects continue to cause ecosystem damage, pollution, and environmental degradation. This study analyzes the contribution of environmental ethics to sustainable development and the role of customary institutions in development planning and decision-making. **Design/methodology/approach:** This study uses a literature study of journals, academic articles, and other references on environmental ethics, sustainable development, and indigenous local wisdom. **Findings/results:** The findings show that environmental ethics provides a crucial moral basis for wise and sustainable natural resource management. Customary institutions also support conservation through local wisdom values passed down across generations, as exemplified by the Kajang Ammatoa community in Bulukumba Regency and Towani Tolotang in Sidenreng Rappang Regency. **Practical implications:** Integrating environmental ethics and local wisdom into development policies can foster more equitable, participatory, and sustainable development. **Originality/value:** This study connects environmental ethics and local wisdom with development planning and decision-making, and indicates that the role of customary institutions should be strengthened.

INTRODUCTION

Pembangunan merupakan proses penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Di era globalisasi, dunia pembangunan terus mengalami perkembangan pesat (Dustyn et al., 2025) seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi, dan digitalisasi. Globalisasi memberikan berbagai dampak positif seperti perkembangan ekonomi, meningkatnya peluang kerja, serta kemajuan teknologi yang berperan dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas manusia melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Namun, di balik perkembangan tersebut, globalisasi juga membawa dampak negatif berupa ketimpangan sosial, pergeseran budaya lokal, serta menurunnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat (Putra et al., 2023).

Selain berdampak pada kehidupan sosial, pembangunan yang terus meningkat juga memberikan pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan hidup. Proses pembangunan yang mencakup industrialisasi, konversi lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek lingkungan telah menjadi salah satu faktor utama terjadinya degradasi

lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, deforestasi, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Perkembangan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan zaman. Akibatnya, berbagai bentuk pembangunan sering kali diarahkan untuk memperkuat proses industrialisasi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas produksi industri perlu didukung oleh peningkatan konsumsi guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya memengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan di masa kini maupun masa mendatang (Ramadhan et al., 2024). Atas dasar kebutuhan untuk menunjang kelancaran proses tersebut, dibentuk sebuah sistem yang disebut modernisasi sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan dan kemajuan masyarakat (Putra et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan agar kehidupan generasi mendatang tetap terjamin.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pendekatan ekonomi yang cenderung mengesampingkan aspek lingkungan, ditambah dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, telah berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan ekosistem berupa deforestasi, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan (Mubarak et al., 2025). Selain itu, perkembangan globalisasi juga memengaruhi pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif dan individualis sehingga mengurangi rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka pembangunan justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup manusia.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan etika dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masa kini dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya dan lingkungan agar kebutuhan generasi berikutnya tetap dapat terpenuhi. Dalam penerapannya, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Yenni et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan landasan moral dan etika yang mampu mengarahkan proses pembangunan agar tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septian Asriadi Putra et al. dalam jurnal *Pengarusutamaan Etika Dalam Pembangunan di Era Globalisasi* menjelaskan bahwa globalisasi memberikan dampak positif berupa perkembangan ilmu pengetahuan, industrialisasi, digitalisasi, dan peluang ekonomi. Namun, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan sosial, perubahan kualitas lingkungan, serta pergeseran nilai moral masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan etika pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan di era globalisasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rizki Khaeratul Hisan et al., 2025) dalam jurnal *Pancasila Sebagai Landasan Moral dan Etika Dalam Pembangunan Nasional* menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan moral dan paradigma pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Rila, 2025). Selain itu, penelitian oleh Imam Mubarak dkk. dalam jurnal *Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Alam: Regulasi, Partisipasi, dan Teknologi Ramah Lingkungan* menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan

penerapan teknologi ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Mubarok et al., 2025) adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya terkait keterlibatan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan di daerahnya, keterlibatan lembaga adat dianggap penting karena masyarakat adat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi alam, keseimbangan lingkungan, serta nilai-nilai lokal yang perlu dijaga dalam pelaksanaan pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip etika lingkungan dan keberlanjutan.

Dengan mengacu pada uraian diatas, artikel ini disusun untuk mengkaji mengenai pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan serta peran nilai-nilai moral dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini penting dilakukan karena pembangunan yang tidak memperhatikan aspek etika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan adanya pemahaman mengenai etika pembangunan berkelanjutan, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kajian ini mengidentifikasi empat variabel.

1. **Etika Lingkungan (EL)**, yaitu landasan moral yang mengarahkan manusia untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakannya, termasuk keadilan antargenerasi dan tanggung jawab ekologis. Definisi ini mengacu pada pandangan etika sebagai filsafat moral yang membahas nilai dan norma tindakan (Magnis-Suseno, 2018) dan pada konsep etika lingkungan dalam pembangunan (Rila, 2025).
2. **Peran Lembaga Adat (LA)**, yaitu keterlibatan lembaga adat yang membawa kearifan lokal, seperti *Pasangri Kajang* pada masyarakat Kajang Ammatoa, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (Fadhel et al., 2021).
3. **Pembangunan Berkelanjutan (PB)**, yaitu pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan lintas generasi (Todaro & Smith, 2020).
4. **Pengabaian Aspek Lingkungan dalam Pembangunan (PL)**, yaitu pembangunan yang berorientasi ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan (Mubarok et al., 2025). Variabel ini diperkirakan berhubungan negatif dengan keberlanjutan pembangunan.

Hubungan antarvariabel

Proposisi 1 (EL - PB, positif). Semakin kuat penerapan etika lingkungan dalam kebijakan dan praktik pembangunan, semakin besar kemungkinan pembangunan mencapai keberlanjutan. Alasannya, etika lingkungan memberi landasan moral yang memengaruhi keputusan konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan publik. Etika ini juga mengakui lingkungan sebagai sesuatu yang bernilai inheren, bukan semata sumber daya ekonomi (Saputra et al., 2025).

Proposisi 2 (LA - PB, positif). Semakin besar keterlibatan lembaga adat dalam pengambilan keputusan pembangunan, semakin besar kemungkinan pembangunan bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Alasannya, lembaga adat memegang pengetahuan ekologis lokal yang diwariskan lintas generasi dan dapat menjadi dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan budaya (Wijaya & Sarjan, 2024). Pada masyarakat Kajang, nilai adat diikuti sanksi bagi pelanggarnya sehingga mendukung penjagaan hutan (Fadhel et al., 2021).

Proposisi 3 (EL - LA, positif, saling menguatkan). Nilai kearifan lokal masyarakat adat sejalan dengan prinsip etika lingkungan, yaitu tanggung jawab terhadap alam, penghormatan terhadap kehidupan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga keduanya diperkirakan saling menguatkan. Alasannya, nilai adat seperti *Pasangri Kajang* mengatur hubungan manusia dengan sesama, Tuhan,

dan alam (Fadhel et al., 2021), dan nilai serupa ditemukan pada komunitas Towani Tolotang (Rasman et al., 2024). Kesejalanan ini membuat lembaga adat dapat menjadi pembawa etika lingkungan dalam praktik.

Proposisi 4 (PL - PB, negatif). Semakin pembangunan mengabaikan daya dukung lingkungan, semakin rendah keberlanjutannya. Alasannya, pengelolaan sumber daya yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi berkaitan dengan kerusakan ekosistem dan ancaman bagi kehidupan masyarakat (Mubarok et al., 2025). Sebagai ilustrasi, perluasan perumahan di Desa Palasari berkaitan dengan berkurangnya lahan sawah dan gangguan sumber air (Ramadhan et al., 2024).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai kontribusi etika lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan pembangunan, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan buku. Data dikumpulkan melalui penelusuran pada *Google Scholar* dan *ResearchGate* dengan kata kunci “etika lingkungan”, “pembangunan berkelanjutan”, “lembaga adat”, “kearifan lokal”, “*Kajang Ammatoa*”, dan “*Towani Tolotang*”. Sumber dipilih berdasarkan kriteria berikut: (1) membahas etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan, atau kearifan lokal masyarakat adat; (2) diterbitkan pada rentang tahun 2018 sampai 2026; (3) berupa artikel pada jurnal ilmiah atau buku akademik; dan (4) dapat diakses secara terbuka. Dari proses ini diperoleh sumber yang dianalisis. *Kajang Ammatoa* dan *Towani Tolotang* dipilih karena keduanya merupakan komunitas adat di Sulawesi Selatan yang masih menjalankan sistem nilai dan kelembagaan adat secara aktif, namun berbeda dalam landasan nilai, struktur otoritas adat, dan konteks sosial-politik. Perbedaan ini memungkinkan analisis komparatif yang menunjukkan variasi bentuk praktik adat dalam satu wilayah budaya. Selain itu, ketersediaan literatur akademik mengenai keduanya menjamin kedalaman data pendukung dan keterlacakan sumber.

RESULT AND DISCUSSION

Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat proses globalisasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam telah mendorong pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Berbagai aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan telah menyebabkan pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat (Putra et al., 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh terbatas pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan guna memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan lintas generasi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur yang digunakan, ditemukan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh penerapan etika lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan cenderung menimbulkan kerusakan ekosistem dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, integrasi prinsip etika lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat mendukung tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Putra et al., 2023); (Khoirul,

2024); (Mubarok et al., 2025); (Saputra et al., 2025); (Rila, 2025).

Menurut Magnis-Suseno (2018), etika merupakan filsafat moral yang membahas nilai dan norma sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan benar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, etika berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan manusia untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, pembangunan tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan ekonomi semata, melainkan juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi pendekatan yang penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan modern.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, etika lingkungan memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan moral dalam pengelolaan lingkungan hidup (Khoirul, 2024). Etika lingkungan menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pemahaman etika lingkungan dapat memengaruhi keputusan terkait konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, etika lingkungan juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena memberikan landasan moral dalam pengelolaan lingkungan serta memfasilitasi terciptanya hubungan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem (Saputra et al., 2025).

Salah satu dampak yang paling terlihat dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek etika adalah meningkatnya kerusakan lingkungan. Berbagai aktivitas pembangunan, seperti pembukaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan industri yang tidak terkendali telah menyebabkan pencemaran lingkungan, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Menurut (Mubarok et al., 2025) pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya memerlukan pertimbangan ekonomi, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup.

Penelitian (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa perkembangan globalisasi dapat memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mubarok dkk. (2025) yang menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan penerapan prinsip-prinsip etika sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Hasil kajian (Saputra et al., 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh keberadaan landasan moral yang mengakui lingkungan hidup sebagai sesuatu yang memiliki nilai inheren, bukan hanya sebagai sumber daya untuk kepentingan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan dapat membantu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, perumusan kebijakan pembangunan perlu dilakukan secara lebih inklusif dengan mengintegrasikan

nilai-nilai moral serta kearifan budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan lembaga adat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan diwariskan secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pelibatan lembaga adat dalam proses pembangunan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap selaras dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai etika lingkungan oleh masyarakat adat dapat ditemukan pada masyarakat adat Kajang Ammatoa tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kajang memiliki sistem nilai adat yang dikenal sebagai *Pasang ri Kajang*, yaitu seperangkat aturan dan pesan leluhur yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, Tuhan, dan lingkungan alam (Fadhel et al., 2021). Melalui nilai-nilai tersebut, masyarakat Kajang menerapkan berbagai aturan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan adat. Hutan dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga keberadaannya sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat menjadi landasan etis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain masyarakat adat Kajang Ammatoa, nilai-nilai etika lingkungan juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Masyarakat Towani Tolotang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Rasman et al., 2024).

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan, seperti tanggung jawab terhadap alam, penghormatan terhadap kehidupan, keadilan, dan keberlanjutan (Niman et al., 2023). Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, lembaga adat dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Keterlibatan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan Bersama (Enala et al., 2025).

Peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat penting karena masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi (Berkes, 2012). Pengetahuan tersebut berpotensi menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, terutama karena lembaga adat menyediakan pemimpin atau penjaga serta aturan sosial bagi pengelolaan sumber daya (Berkes et al., 2000; Ostrom, 1990). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi sasaran kebijakan pembangunan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam upaya pelestarian lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut berbeda dengan model pembangunan modern yang cenderung menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengintegrasian nilai-nilai adat serta etika lokal ke dalam kebijakan pembangunan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pelibatan lembaga adat dalam proses

pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan merupakan langkah yang strategis. Masyarakat adat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi ekologis wilayahnya serta nilai-nilai lokal yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dengan demikian, keterlibatan lembaga adat tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga membantu mewujudkan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya membahas keterkaitan antara etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara konseptual, kajian ini menitikberatkan pada peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Peran tersebut menjadi penting karena masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis lokal yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi jangka panjang dengan lingkungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini dapat menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan, tetapi juga pada partisipasi aktif lembaga adat yang memiliki pengetahuan ekologis lokal sehingga mampu mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan secara lebih arif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kearifan lokal merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Pembangunan yang dilandasi oleh etika lingkungan dan didukung oleh keterlibatan lembaga adat cenderung lebih mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rila, 2025); (Saputra et al., 2025). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika lingkungan dan kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, etika lingkungan dapat dipandang sebagai landasan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Etika lingkungan berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta hanya mengejar pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan berbagai bentuk pencemaran yang mengancam kualitas lingkungan hidup, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan berkaitan tidak hanya dengan kebijakan pemerintah dan penerapan etika lingkungan, tetapi juga dengan partisipasi masyarakat dan peran strategis lembaga adat dalam proses pembangunan. Kearifan lokal yang berkembang dalam komunitas *Kajang Ammatoa* di Bulukumba dan *Towani Tolotang* di Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat berfungsi sebagai landasan dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pengintegrasian etika lingkungan, kearifan lokal, dan keterlibatan lembaga adat dalam kebijakan pembangunan berpotensi menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan data sekunder, tanpa pengumpulan data lapangan, sehingga temuan bergantung pada cakupan dan kualitas sumber yang ditelaah dan tidak dapat memastikan praktik aktual di lapangan. Kedua, contoh kearifan lokal dibatasi pada dua komunitas adat di Sulawesi Selatan, yaitu *Kajang Ammatoa* dan *Towani Tolotang*, sehingga generalisasi temuan ke komunitas adat lain dengan konteks sosial, budaya, dan ekologis yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, analisis deskriptif-analitis bersifat interpretatif dan tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik, sehingga hubungan antara etika lingkungan, peran lembaga adat, dan pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai proposisi, bukan hubungan sebab-akibat yang teruji.

REFERENSI

- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology* (3rd ed.). Routledge.
- Dustyn, C., Chandra, J., Pendidikan, P., Insinyur, P., Petra, U. K., & Profesionalisme, A. (2025). *Kajian Etika dan Profesionalisme Dalam Pembangunan Kanopi dan Ruko*. 3(September), 26–31.
- Enala, S. H., Mana, F. A., Novan, M., & Adam, A. F. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Lokal di Kabupaten*. 02(01), 8–17.
- Fadhel, A., Akhmad, M. A., Jannah, A. M., Azizah, R., & Makassar, U. M. (2021). *Jurnal Citra Pendidikan (JCP) PASANG RI KAJANG SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAWASAN ADAT AMMATOA berbeda-beda salah satunya berada di Desa Tanah Towa yang menjadikan Pasang sebagai serta alam sekitar . Sekolah harus mengamb. 1.*
- Khoirul, D. (2024). Menciptakan Keadilan Lingkungan bagi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemahaman Etika Lingkungan . *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2 SE-Articles), 587–593. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2907>
- Mubarok, I., Pujiati, A., & Nihayah, D. M. (2025). Dinamika pengelolaan sumber daya alam: Regulasi, partisipasi, dan teknologi ramah lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 16(1), 8–15.
- Niman, E. M., Tapung, M., Rudiyanto, Z., Ntelok, E., & Darong, H. C. (2023). *Paradigma : Jurnal Kajian Budaya KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN AIR : STUDI ETNOGRAFI MASYARAKAT ADAT MANGGARAI, FLORES, .* 13(1). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v13i1.1160>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Putra, S. A., Riyanto, V., Haidar, F. A., & Wiranta, D. O. (2023). PENGARUSUTAMAAN ETIKA DALAM PEMBANGUNAN DI ERA GLOBALISASI. *Journal of Syntax Literate*, 8(2), 1344.
- Ramadhan, W., Balya, M., & Syaban, A. (2024). *Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Kondisi Lingkungan Di Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang*. 25, 52–62.
- Rasman, R., Madjid, A., & Musmuliadi, M. (2024). KOMUNITAS HINDU TOLOTANG DALAM PELESTARIAN WISATA. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 3(01), 1–18.
- Rila, R. S. N. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Pembangunan Nasional. *Journal of Education*, 1(3), 540–547.
- Saputra, H. Y., Syah, N., Azhar, A., Alam, I. P., Pengetahuan, I., & Padang, U. N. (2025). *Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan : Studi Literatur*. 4(3), 2972–2979.
- Yenni, R., Astuti, L., & Purnomo, E. P. (2021). *TERHADAP STRATEGI KETAHANAN PERKOTAAN (Studi Kasus : Perubahan Iklim di Kota Malang)*. 155–162.

